

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ETPD di Indonesia dibagi dalam empat tahap yaitu tahap digital sebanyak 191 daerah, tahap maju sebanyak 236 daerah, tahap berkembang sebanyak 101 daerah dan tahap inisiasi sebanyak 14 daerah. Hasil tersebut mengindikasikan beberapa hal, antara lain yaitu:
 - a. Perkembangan ETPD di Indonesia masih didominasi daerah pada tahap maju atau tahapan dimana pemerintah daerah berupaya lebih baik dalam menyediakan mengembangkan berbagai kanal digital untuk ETP dan berupaya lebih baik dari sudut pandang tata kelola pemerintah dalam bentuk integrasi CMS dan SP2D Online, mempromosikan ETPD kepada masyarakat melalui sosialisasi, dan didukung infrastruktur komunikasi yang memadai.
 - b. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam perkembangan implementasi ETPD di Indonesia, karena kondisi wilayah Indonesia yang heterogen dan adanya alasan kontekstual terutama dalam hal tata kelola, sumber daya manusia dan infrastruktur. Wilayah Pulau Jawa dan Bali di dominasi dengan daerah tahap digital, Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi didominasi dengan daerah tahap maju, serta Pulau Maluku dan Papua didominasi dengan daerah berkembang.
 - c. Pemetaan daerah keberhasilan implementasi ETPD memperlihatkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki layanan perbankan digital cenderung mendapat indeks ETPD yang lebih tinggi dan masuk dalam tahap maju bahkan tahap digital. Serta kerjasama daerah dengan e-commerce seperti dalam pembayaran pajak dan retribusi akan meningkatkan implementasi ETPD sehingga dapat menjadi kanal untuk memperluas dan

mempercepat pelaksanaan ETPD dan mampu mendukung suatu daerah untuk go digital.

2. Tidak terdapat hubungan antara laju pertumbuhan PAD terhadap indeks ETPD dan memiliki korelasi negatif. Serta terdapat hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dari PDRB terhadap indeks ETPD dan memiliki korelasi positif yang lemah.

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengisian data untuk indeks ETPD oleh pemerintah daerah agar lebih diawasi, untuk mengurangi kekeliruan dan kecurangan dalam pengisian data. Karena setiap pemerintah daerah selalu berusaha untuk memperlihatkan kebaikan yang ada di pemerintahannya tanpa sesuai dengan fakta yang ada, sehingga bisa saja pengisian data survey di lebih-lebihkan untuk mendapatkan tingkat indeks yang lebih tinggi. Selain itu juga diupayakan untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah terkait ETPD sehingga pengisian survey ETPD akan lebih valid sesuai kondisi daerah. Serta meningkatkan kelembagaan pemda dan meningkatkan kemampuan sumber daya pemda dalam melakukan tata kelola keuangan secara elektronik, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan, dan pengendalian dalam mendukung pengembangan ETPD.
2. Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan agar terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan pelaksanaan transaksi non tunai sehingga wajib pajak mengerti dan turut mendukung kebijakan-kebijakan ETPD yang akan dilaksanakan.
3. Ketersediaan teknologi merupakan bagian penting dari pengembangan ETPD, namun tidak semua wilayah di Indonesia, baik pusat maupun daerah yang mempunyai infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan ETPD, sehingga terjadi ketimpangan digital. Untuk itu, pemerintah perlu penguatan pembangunan infrastruktur seperti kanal pembayaran digital, jaringan telekomunikasi, dan

berbagai aplikasi untuk mendukung fungsi ETPD yang dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada publik, baik dalam bentuk layanan publikasi, interaksi maupun transaksi sehingga akan berjalan maksimal, efisien, dan menghilangkan ketimpangan.

4. Perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung terlaksananya penerapan ETPD, baik mendukung dalam pembuatan peraturan, alokasi anggaran, sampai konsistensi dan koordinasi pemerintah dalam menyukseskan penerapan ETPD itu sendiri.
5. Bagi penelitian selanjutnya yang sejenis diharapkan untuk menambah periode penelitian untuk melihat konsistensi hasil penelitian dan mengembangkan pemetaan dalam skala yang lebih kecil dan rinci agar nantinya bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan secara komprehensif bagi pemerintah dalam menerapkan ETPD. Serta diharapkan untuk memperdalam analisis dengan melihat pengaruh implementasi ETPD terhadap indikator kinerja keuangan daerah berupa efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan ekonomis.

